



Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal

Riadhhotun Nur¹⁾; Tunggul Sihombing²⁾

¹⁾ Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ riadhotunnur@gmail.com ; ²⁾ tlumbantoruan@yahoo.co.id

ARTICLE HISTORY

Received [115 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [19 Desember 2022]

KEYWORDS

Effectiveness, Policy Implementation, Subsidized Fertilizer

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penyaluran pupuk bersubsidi merupakan proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari pelaksana subsidi pupuk sampai dengan petani sebagai konsumen akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci efektivitas implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba masih memerlukan pembenahan karena belum efektif. Dari segi pendekatan sumber masih belum efektif karena adanya staf yang kurang memadai dalam memberikan informasi kepada petani, tetapi dalam pemenuhan fasilitas sudah dikatakan efektif. Pada pendekatan proses, pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi masih mengalami keterlambatan, kemudian pupuk bersubsidi yang disalurkan juga tidak sesuai dengan kebutuhan para petani, harga pupuk bersubsidi juga mengalami kenaikan yang menjadi kesulitan bagi para petani. Dari segi pendekatan sasaran, penyaluran pupuk bersubsidi sudah efektif karena pengecer di Desa Bangun Purba hanya memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani yang terdaftar saja.

ABSTRACT

Subsidized fertilizer distribution is the process of distributing subsidized fertilizer from fertilizer subsidy implementers to farmers as final consumers. This study aims to determine and describe in detail the effectiveness of implementing subsidized fertilizer distribution policies for farmers in Bangun Purba Village, Lembah Sorik Merapi District, Mandailing Natal Regency. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the subsidized fertilizer distribution policy in Bangun Purba Village still needed improvement because it was not yet effective. In terms of the source approach it is still not effective because there are inadequate staff in providing information to farmers, but in terms of fulfilling facilities it is said to be effective. In the process approach, the implementation of the distribution of subsidized fertilizers is still experiencing delays, then the subsidized fertilizers that are distributed are also not in accordance with the needs of farmers, the price of subsidized fertilizers has also increased which is a difficulty for farmers. In terms of the targeting approach, the distribution of subsidized fertilizers has been effective because the retailers in Bangun Purba Village only provide subsidized fertilizers to registered farmers.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Pertanian di Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pertanian diatur oleh Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana urusan dibidang pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kecukupan pangan perlu diperhatikan karena pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam mempertahankan hidup bagi setiap orang. Kebutuhan pangan terus meningkat dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pertanian diatur oleh Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana urusan dibidang pertanian. Seperti yang diketahui tujuan dari pertanian di Indonesia yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dalam penyediaan kebutuhan pokok pangan untuk masyarakat sudah menjadi tugas dari Dinas Pertanian. Kecukupan pangan perlu diperhatikan karena pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam mempertahankan hidup bagi setiap orang. Kebutuhan pangan di Indonesia tidak pernah menurun tetapi lebih meningkat disebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Ketersediaan pangan yang lebih kecil

dibandingkan dengan kebutuhan yang ada dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan maka masalah dan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi lebih besar, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan harus lebih diperhatikan.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya ketersediaan pangan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam pertanian salah satunya yaitu dengan adanya penyediaan pupuk bersubsidi bagi para petani khususnya di Desa Bangun Purba Kabupaten Mandailing Natal.

Penerapan kebijakan pupuk bersubsidi sudah ada sejak tahun 1970-an, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi, serta untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Salah satu subsidi disektor pertanian adalah subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi merupakan suatu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani guna untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia.

Penulis melihat bahwa petani yang mendapat pupuk bersubsidi adalah petani yang telah memiliki Kartu Kependudukan (KTP), petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar, petani yang terdaftar pada kelompok tani dan masuk dalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan petani harus masuk dalam Program Elektronik RDKK (e-RDKK). Penyaluran pupuk bersubsidi sangat diperlukan bagi para petani di berbagai daerah Indonesia karena mayoritas petani di Indonesia memiliki penghasilan menengah ke bawah dan memerlukan pupuk untuk bertani. Harga pupuk yang tinggi membuat para petani berfikir untuk membelinya, maka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut sangat berguna bagi para petani karena mereka dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang baik.

Penulis menemukan bahwa penyaluran pupuk subsidi harus sesuai dengan prinsip 6(enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi berbeda-beda, di mana harga pupuk bersubsidi untuk Pupuk Urea, Rp.2.250,-per kg, Pupuk SP-36, Rp.2.400,-per kg, Pupuk ZA, Rp.1.700,-per kg, Pupuk NPK, Rp.2.300,-per kg, Pupuk NPK Formula Khusus, Rp.3.300,-per kg, Pupuk Organik Granul, Rp.800,-per kg, dan Pupuk Organik Cair, Rp.20.000,-per kg. HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pupuk bersubsidi dalam kemasan ditetapkan yaitu untuk Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan Pupuk NPK Formula Khusus 50 Kg per Kemasan, sedangkan untuk Pupuk Organik ditetapkan 40 Kg per Kemasan.

Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu ialah teori efektivitas dari Hari Lubis dan Martani Huseini. Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, di mana efektivitas memiliki pendekatan utama yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), dan pendekatan sasaran (*goal approach*) Lubis dan Huseini (1987:55).

Terkait dengan efektivitas implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba, penulis menemukan permasalahan seperti kurang memadainya pegawai atau penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di Desa Bangun Purba yang kurang memberikan informasi kepada kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini diketahui karena ada keluhan masyarakat yang masih kurang paham dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Ketidapkahaman masyarakat juga disebabkan oleh adanya sistem terbaru di tahun 2021 dengan memberikan *fotocopy* KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, para petani yang seharusnya memiliki akte notaris juga tidak diinformasikan dengan baik oleh PPL di Desa Bangun Purba. Seharusnya PPL di Desa Bangun Purba menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPL dengan memperhatikan kebijakan maupun wewenang yang ada.

Penulis juga menemukan permasalahan lain, yaitu terkait dengan pendekatan proses yang melihat bagaimana efisiensi pelayanan terkait ketepatan waktu dan biaya, serta terkait dengan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan jadwal tanam, sehingga para petani memupuk sawahnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi juga diakibatkan oleh pengajuan yang lama, hal ini disebabkan oleh perubahan sistem dalam pengajuan pupuk bersubsidi yang dulunya dilakukan secara manual sekarang menjadi *online* yang terkadang sistemnya masih mengalami masalah karena sulit di akses.



Permasalahan lain yang penulis temukan yaitu terkait dengan pendekatan proses, di mana pupuk bersubsidi yang tersalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan petani, karena luas lahan petani tidak sesuai dengan jumlah pupuk bersubsidi yang diterima. Kurangnya jumlah pupuk yang tersalurkan ini terjadi karena tidak sesuaiannya realisasi pengadaan pupuk bersubsidi dengan alokasi yang dibuat. Tahun 2021 dosis dalam pemupukan juga dikurangi dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya perhektar lahan petani itu mendapat 200kg, tetapi untuk 2021 hanya 100kg pupuk bersubsidi perhektarnya yang mengakibatkan kekurangan pupuk bersubsidi sehingga untuk pemenuhannya digunakan pupuk non subsidi. Selain itu juga, terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kenaikan pupuk bersubsidi terjadi karena adanya usulan dari kontak tani nelayan andalan, dan kenaikan tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran.

LANDASAN TEORI

Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu ialah teori efektivitas dari Hari Lubis dan Martani Huseini yang mengatakan bahwa “Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”. Efektivitas menurut Lubis dan Huseini (1987:55) memiliki 3 pendekatan utama yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), dan pendekatan sasaran (*goal approach*).

Menurut Siagian (2002:4) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2006:61) “Efektivitas merupakan suatu rumusan yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan dalam melakukan tugas, agar dapat diketahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan maupun program yang dilakukan, agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat menggambarkan atau mengungkapkan suatu keadaan sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian Effendi (2012:5). Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan penulis ialah dinas pertanian, kelompok tani, dan masyarakat penerima pupuk bersubsidi. Dengan demikian, penulis memilih Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, Admin RDKK Bidang Prasarana dan Sarana, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Bangun Purba, Koordinator BPP Pasar Maga, KUPT BP3 Mandailing Julu, Distributor Pupuk Bersubsidi, Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Desa Bangun Purba, serta Masyarakat Kelompok Tani di Desa Bangun Purba. Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data, dengan mengelompokkan para pemangku kepentingan sebagai sumber data/informasi melalui wawancara mendalam dan membandingkan hasil wawancara mendalam untuk memperoleh informasi

yang valid yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang selanjutnya dideskripsikan dan dikategorisasikan, kemudian menggunakan triangulasi teori dengan mempergunakan berbagai profesional dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan untuk menilai suatu data/informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diamanatkan pada Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang Dalam Pengawasan, di mana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu.

Penulis melihat penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba diperuntukkan bagi pertanian dan perkebunan yang maksimal lahannya 2 hektar. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis mengkaji efektivitas implementasikebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba berdasarkan 3 pendekatan efektivitas yang dikemukakan oleh Lubis dan Huseini (1987:55) yang terdiri dari pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), dan pendekatan sasaran (*goal approach*).

Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Penulis melihat pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Lubis dan Huseini (1987:55) menyebutkan bahwa organisasi dalam melaksanakan program dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya menggunakan sumber daya yang tepat. Sumber daya fisik dapat berupa sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sumber daya non fisik dapat berupa informasi serta wewenang yang ada. Teori Huseini dan Lubis sejalan dengan elemen sumber daya menurut Edwards, yang didalamnya terdapat sumber daya staf, fasilitas, informasi, dan wewenang

Staff

Penulis melihat bahwa sumber daya utama dalam pelaksanaan suatu program adalah bagaimana pelaksana kebijakan melakukan tugasnya. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan suatu program disebabkan kompetensi pegawai yang tidak memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal memiliki pegawai sebanyak 142 orang pegawai, yang di dalamnya terdiri dari 53 pegawai negeri sipil dan 89 pegawai honorer yang tingkat pendidikannya mulai dari SMA Sederajat sampai dengan Sarjana tetapi tidak sesuai dengan bidangnya, karena terdapat pegawai yang lulusan sarjana ekonomi, sarjana hukum yang di tempatkan bukan di bidang dari latar belakang pendidikan mereka.

Pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba, Dinas Pertanian memberikan tugas kepada perwakilannya untuk membantu kegiatan penyusunan RDKK yaitu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). PPL yang harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas dari PPL di Desa Bangun Purba yaitu Membuat-RDKK, kemudian ditugaskan untuk meminta tanda tangan surat pengajuan ke UPT Dinas Pertanian di Kecamatan, yang berisi rincian kebutuhan pupuk bersubsidi yang sudah ditanda tangani oleh ketua kelompok dari setiap kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa PPL di Desa Bangun Purba belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. Meskipun PPL memang sudah membantu masyarakat dalam penyusunan RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tetapi masyarakat petani berpendapat bahwa PPL di Desa Bangun Purba itu tidak bijak karena penyaluran pupuk yang lambat. Dalam mengurus administrasi, PPL di desa lambat dalam proses pengajuan surat untuk meminta tanda tangan ke BPP Pasar Maga dan KUPT Mandailing Julu, sehingga pengecer di desa



pun tidak bisa mengajukan surat tersebut dengan cepat ke distributor pupuk bersubsidi yaitu Mitra Tani yang bekerjasama dengan pengecer resmi di Desa Bangun Purba.

Informasi

Informasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Penulis melihat bahwa di desa Bangun Purba, masyarakat sudah mengetahui adanya pupuk bersubsidi yang diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok tani Al Fatih sesuai dengan yang ada di RDKK yang disampaikan oleh PPL di lapangan. Namun, sistem dalam penyaluran pupuk bersubsidi sudah berbeda karena yang dahulunya RDKK itu dibuat secara manual, sekarang menjadi *online* yaitu e-RDKK. Dalam hal ini kelompok tani masih mengalami kesulitan karena kurangnya pemahaman para petani, ditambah lagi pada 2021 sistem penebusan pupuk harus menggunakan *fotocopy* KTP, tetapi di lapangan petani sulit untuk mengumpulkan fotocopy KTP karena merasa tidak ada kejelasan mengapa KTP itu diminta, sehingga pengajuan pupuk oleh pengecer pun menjadi terhambat.

Selanjutnya, penulis melihat kurangnya pemahaman kelompok tani dengan adanya sistem *online* baru, membuat pengecer yang mendapatkan imbasnya karena terlambatnya penyaluran pupuk, seharusnya PPL di dan kelompok tani di Desa Bangun Purba saling berkomunikasi agar apa yang menjadi masalah di lapangan cepat terselesaikan, sehingga yang menjadi masalah yang kecil seperti pengumpulan *fotocopy* KTP tidak terjadi, dan proses pengajuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi lebih cepat. Tahun 2020 penyaluran pupuk bersubsidi tidak mengalami keterlambatan separah di tahun 2021 karena belum menggunakan *fotocopy* KTP yang lebih mempermudah pengecer dan kelompok tani.

Selain itu juga, informasi terkait perlunya dibuat akte notaris untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi masih belum diketahui oleh para petani, sehingga belum diwajibkan untuk mendapatkan bantuan daerah, tetapi PPL di lapangan seharusnya memberikan arahan agar masyarakat memahami hal tersebut dan nantinya bisa mendapatkan bantuan-bantuan lain yang dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Bangun Purba. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di Desa Bangun Purba bahwa pelaksana kebijakan yang ada di Desa masih kurang jelas memberikan informasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi PPL Desa Bangun Purba belum efektif.

Wewenang

Kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi efektivitas dari suatu kewenangan akan menyurut apabila terjadi penyelewengan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri ataupun demi kepentingan kelompoknya. Penulis melihat bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. Dari peraturan tersebut, para pegawai di bagian sarana dan prasarana mengetahui tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi penyelewengan pegawai yang bekerja di bagian seksi pupuk, pestisida dan alsintan. Dari informasi yang penulis temukan, bidang sarana dan prasarana bertugas untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi perkecamatan, kemudian bertugas dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, setelah pupuk bersubsidi tersebut tersalurkan maka selanjutnya membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada kepala dinas pertanian Kabupaten Mandailing Natal, serta tugas yang diberikan untuk admin RDKK tingkat kabupaten yaitu memantau serta membantu admin kecamatan dalam memasukkan data kelompok tani apabila mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa terjadi penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di sebagian daerah di Kabupaten Mandailing Natal, di mana pengecer resmi di salah satu desa yang bersebelahan dengan Desa Bangun Purba menjual pupuknya ke masyarakat di Desa Bangun Purba, padahal itu tidak menjadi wilayahnya dalam pembagian pupuk bersubsidi. Pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan, sehingga pelaksanaan tugas pegawai dapat dikatakan efektif. Tetapi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba masih mengalami penyelewengan dikarenakan adanya pengecer yang memberikan pupuk bersubsidi tersebut ke petani yang bukan pendapat bantuan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pembangunan sarana dan prasarana yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu program ataupun kegiatan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa untuk penyaluran pupuk bersubsidi pengangkutan pupuk bersubsidi dari distributor ke pengecer resmi di Desa Bangun Purba menjadi tanggung jawab dari Distributor Mitra Tani, yaitu dengan menggunakan transportasi berupa truk besar. Proses dalam memindahkan pupuk bersubsidi dari truk distributor ke gudang pengecer dilakukan oleh masyarakat Desa Bangun Purba, dengan upah yang diberikan sesuai dengan jumlah yang mereka pindahkan, yaitu Rp. 1.000 per karungnya.

Penulis melihat bahwa terdapat gudang penyimpanan pupuk bersubsidi dan kebutuhan tani lainnya, seperti pestida dan bibit-bibit tanaman. Dengan adanya gudang tersebut, penyimpanan pupuk menjadi lebih aman karena dapat terhindar dari panas matahari dan cuaca buruk seperti hujan, yang dapat merubah bentuk pupuk bersubsidi tersebut karena sifat pupuk yang mudah mencair dan membeku. Selain itu, fasilitas pendukung dalam penyaluran pupuk bersubsidi sudah memadai, karena sudah memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya fasilitas seperti transportasi pengangkutan pupuk bersubsidi, tersedianya gudang pengecer, dan adanya timbangan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani, maka dapat mempermudah proses penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga dalam penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi, penyaluran pupuk bersubsidi dari segi pendekatan sumber masih mengalami belum efektif. Hal ini dikarenakan meskipun fasilitas yang sudah memadai dan mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi, namun dalam hal *staff* (sumber daya manusia) masih belum memadai dan tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, informasi yang tidak dipahami oleh para petani dan kurang pahamnya petani dengan RDKK *online*, serta adanya penyalahgunaan wewenang juga mengakibatkan terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi.

Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Desa Bangun Purba apakah terdapat masalah dalam penyalurannya di lapangan.

Efisiensi Pelayanan

Efisiensi pelayanan melihat bagaimana kepastian waktu dan biaya terkait penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Desa Bangun Purba. Penulis melihat bahwa pelaksanaan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi mengalami keterlambatan karena penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba tersalurkan setelah melewati masa tanam petani untuk memupuk sawahnya. Sehingga dengan adanya keterlambatan tersebut produktivitas tani menjadi menurun.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terlihat bahwa pemupukan padi pertama di tahun 2021 dimulai pada masa tanam di bulan Januari, dan untuk masa tanam kedua di bulan Juli 2021, tetapi kenyataan di lapangan pupuk bersubsidi baru tersalurkan di bulan September dan Desember 2021, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memupuk. Dari yang penulis amati, untuk memenuhi kebutuhan sawahnya, para petani ada yang membeli pupuk bersubsidi ke desa lain, kemudian ada juga petani yang memupuk padinya menggunakan stok pupuk subsidi di tahun sebelumnya, karena petani tidak menanam padi di tahun sebelumnya melainkan berkeburun. Ada sebagian petani yang membeli pupuk urea non subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Selain itu, dengan adanya keterlambatan tersebut sebagian petani tidak memperdulikan sawahnya karena petani tidak memiliki stok pupuk bersubsidi dan kesulitan dalam perekonomiannya, sehingga menjadikan produktivitas padi menurun.

Keterlambatan penyaluran pupuk tersebut disebabkan oleh sistem yang berubah terlalu cepat dari yang serba manual menjadi *online*, sehingga menyulitkan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Penulis melihat bahwa sistem juga mengalami masalah karena sulit untuk diakses, serta keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi juga terjadi akibat jarak-jarak Kecamatan dan Desa-Desa di Mandailing Natal yang cukup jauh. Kesulitan lainnya yaitu dalam



pengumpulan *fotocopy* KTP yang disebabkan masyarakat petani yang tidak mau memberikannya, sehingga pengajuan untuk penebusan pupuk menjadi terlambat.

Selain masalah keterlambatan penyaluran, penulis juga menemukan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk para petani masih mengalami kekurangan dari jumlah yang seharusnya di dapatkan. Hal ini dikarenakan tidak sesuainya realisasi dengan alokasi pupuk bersubsidi. Pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun 2021 juga mengalami kekurangan, perhektar lahan petani yang seharusnya mendapat 200kg menjadi 100kg perhektarnya, dikurangi 50% dari jumlah seharusnya. Pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi semakin lama semakin berkurang, dari yang penulis amati di tahun 2019 sebelum adanya pengurangan, alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 32,6 ton dan setelah dikurangi menjadi 16,3 ton. Untuk penebusan di tahun 2019 di Desa Bangun Purba pupuk bersubsidi tersalurkan 28 ton sedangkan untuk tahun 2020 sudah sangat berkurang menjadi 14,8 ton dan semakin berkurang di tahun 2021 hanya mencapai 14 ton saja. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan, para petani membeli pupuk non subsidi.

Penulis juga menemukan bahwa kenaikan harga pupuk bersubsidi pada tahun 2021 menjadikan masyarakat mengeluh dengan keadaan itu. Meskipun kenaikan harga pupuk tersebut tidak terlalu tinggi, namun karena sulitnya ekonomi masyarakat petani di Desa Bangun Purba makapara petani merasakan dampak dengan adanya kenaikan harga tersebut. Harga pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba tahun 2019 dan 2020 dijual Rp100.000 per karung sedangkan di harga HET untuk penjualan seharusnya Rp 90.000, dan di tahun 2021 pupuk bersubsidi di jual Rp125.000 per karung sedangkan di harga HET untuk penjualan seharusnya Rp 112.500. penulis menemukan bahwa hal tersebut terjadi karena kios pengecer belum mendapat keuntungan sedikit pun dari penjualan di lapangan jika di jual berdasarkan harga HET, karena harga HET tersebut merupakan modal yang di dapat dari pembelian pupuk bersubsidi di distributor.

Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok Kerja

Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja merupakan aspek penting untuk dapat meningkatkan semangat para pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Semakin baik kerjasama yang terjalin maka semakin tinggi loyalitas antara kelompok kerja, semakin tinggi juga rasa solidaritas dan saling memiliki di antara pegawai, sehingga akan semakin efektif pelayanan yang diberikan oleh distributor dan pengecer tersebut dalam upaya penyaluran pupuk bersubsidi. Dari yang penulis amati, terdapat surat perjanjian yang sah di mata hukum yang menjadikan kerjasama menjadi lebih baik dan terarah, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Penulis juga melihat bahwa untuk meningkatkan kebersamaan, loyalitas, serta solidaritas di antara kedua belah pihak, dilakukan pengajian oleh distributor dengan mengundang pengecer-pengecer dan agen-agen yang terikat dengan distributor.

Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan

Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan suatu program sangat dibutuhkan dalam hal komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif, karena semakin kuat hubungan antara pimpinan dan bawahan maka akan semakin efektif pula kegiatan itu berjalan dalam mencapai tujuan. Penulis melihat bahwa komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal dengan distributor Mitra Tani sudah berjalan dengan efektif, karena dalam hal komunikasi dan koordinasi seperti pemberian laporan oleh distibutor ke Dinas Pertanian selalu diberikan laporan perminggu dan perbulannya secara tertulis untuk dapat diketahui bagaimana realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan. Kemudian apabila ada keperluan baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal maupun distributor Mitra Tani selalu dilakukan komunikasi melalui via telepon agar komunikasi selalu berjalan baik sehingga pelaksanaannya menjadi efektif.

Penulis juga melihat bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara distributor Mitra Tani dengan pengecer resmi di Desa Bangun Purba sudah efektif. Apabila ada keperluan yang ingin disampaikan oleh pengecer ke distributor, maka pengecer langsung datang ke distributor agar apa yang disampaikan menjadi lebih rinci dan detail, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian. Penulis juga melihat bahwa komunikasi dan koordinasi antara pengecer pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba dengan masyarakat kelompok tani di Desa Bangun Purba sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Masyarakat kelompok tani selalu datang ke kios pengecer bukan hanya untuk bertanya

mengenai pupuk bersubsidi saja, melainkan untuk membeli kebutuhan lainnya karena pengecer pupuk di Desa Bangun Purba juga menjual sembako. Ketika masyarakat membeli kebutuhan sembako, mereka juga bertanya mengenai kapan kepastian waktu pupuk itu akan disalurkan, terkadang jika sudah bisa melakukan pembayaran sekaligus berbelanja para petani juga membayar pupuknya sesuai dengan bagian yang ia dapatkan. Jadi komunikasi pengecer pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba dan masyarakat kelompok tani di Desa Bangun Purba sudah berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi, penyaluran pupuk bersubsidi dari segi pendekatan proses masih belum dikatakan efektif. Meskipun dari segi semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, serta hubungan antara pimpinan dan bawahan sudah efektif, namun dari segi efisiensi pelayanan masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, adanya perubahan sistem dari manual menjadi *online* yang membuat masyarakat kesulitan dalam hal memahaminya, adanya pengurangan pupuk yang diberikan, serta adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi yang mengakibatkan masyarakat di Desa Bangun Purba mengalami kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut.

Pendekatan Sasaran (Goals Approach)

Pendekatan sasaran mengukur suatu keberhasilan program berdasarkan hasil yang dicapai apakah sudah sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya. Pendekatan sasaran melihat efektivitas dari segi tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Dari segi tepat sasaran, penulis melihat bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba sudah tepat sasaran. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, pengecer resmi di Desa Bangun Purba hanya memberikan kepada masyarakat masuk ke dalam kelompok tani yang terdata di e-RDCK. Kelompok tani sebagai penerima bantuan pupuk bersubsidi juga sudah merasakan manfaat dengan adanya program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, petani yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi adalah petani yang telah memiliki e-KTP, petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang memiliki luas lahan dibawah 2 hektar, petani yang terdaftar pada kelompok tani dan masuk dalam SIMLUHTAN, serta petani harus masuk dalam program e-RDCK. Untuk petani yang tidak memiliki KTP tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi karena tidak terdata. Dari segi tepat jumlah dan tepat waktu, penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba belum dikatakan efektif, karena dalam penyaluran pupuk bersubsidi masih kurang dari jumlah pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima. Penyaluran pupuk bersubsidi juga belum tepat waktu karena masih mengalami keterlambatan dari waktu pemupukan para petani di Desa Bangun Purba.

Oleh karena itu, para petani hanya merasa terbantu dari segi harga pupuk bersubsidi yang jauh lebih murah dari pupuk non subsidi, sedangkan untuk penerima bantuan pupuk bersubsidi tersebut sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adanya pupuk bersubsidi sangat membantu masyarakat petani dilihat dari segi harga pupuk bersubsidi tersebut, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat dikatakan efektif berdasarkan pendekatan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dari segi pendekatan sasaran sudah efektif. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan bagi penerima pupuk bersubsidi, di mana para petani yang menerima bantuan harus memiliki e-KTP, memiliki lahan di bawah 2 hektar, dan sudah tergabung di dalam kelompok tani, serta harus terdaftar di dalam e-RDCK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Para Petani masih belum efektif dengan pendekatan efektivitas yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu, pada pendekatan sasaran dari segi staf masih kurang memadai, dari segi



memenuhkan sarana prasarana di Desa Bangun Purba sudah terpenuhi karena sudah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemudian dalam memberikan informasi, masyarakat kelompok tani masih ada yang tidak tahu informasi mengenai detail pupuk bersubsidi. Dari segi wewenang Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan tugasnya berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, akan tetapi penyelewengan yang terjadi justru berasal dari pengecer resmi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Pada pendekatan proses, penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba masih belum dikatakan efektif. Meskipun dari segi semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, serta hubungan antara pimpinan dan bawahan sudah efektif, namun dari segi efisiensi pelayanan masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, adanya perubahan sistem dari manual menjadi *online* yang membuat masyarakat kesulitan dalam hal memahaminya, adanya pengurangan pupuk yang diberikan, serta adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi yang mengakibatkan masyarakat di Desa Bangun Purba mengalami kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut.

Pada pendekatan sasaran, penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba sudah efektif. Penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba sudah tepat sasaran, hal ini dikarenakan petani yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu petani yang telah memiliki e-KTP, petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang memiliki luas lahan dibawah 2 hektar, petani yang terdaftar pada kelompok tani dan masuk dalam SIMLUHTAN, serta petani harus masuk dalam program e-RDKK. Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi dari segi pendekatan sasaran sudah tepat sasaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yaitu:

1. Dari segi pendekatan sumber, pelaksana kebijakan di lapangan harus memiliki skill dan adanya pelaksana yang kompeten dibidangnya, yang dapat memberikan informasi yang jelas kepada petani, supaya pelaksana di lapangan yang menjadi wakil Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal mengetahui apa tugas dan fungsinya dengan jelas sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan dalam upaya Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Para Petani di Desa Bangun Purba. Selain itu juga, fasilitas pendukung tidak boleh di anggap tidak penting karena itulah yang akan mempermudah dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.
2. Dari segi pendekatan proses, diharapkan pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi bekerja dengan lebih sigap agar tidak ada lagi keterlambatan, kurangnya jumlah pupuk bersubsidi yang tersalurkan, dan kenaikan harga. Kemudian untuk semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja yang sudah baik dan efektif diharapkan seterusnya terjalin dengan lebih baik lagi, serta penulis berharap komunikasi dan koordinasi yang sudah berjalan dengan efektif seterusnya dapat dipertahankan.
3. Dari segi pendekatan sasaran, penulis berharap supaya tidak ada penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar program ini terus berjalan dengan baik dan bisa menjadi lebih efektif lagi kedepannya. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi lebih baik dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa adanya ikut campur dari pihak lain seperti badan usaha di daerah agar penyalurannya menjadi efektif yang dapat mengurangi biaya dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Huseini, Martani dan Hari Lubis. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar. Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.

- Nur, Riadhotun. 2022. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Para Petani di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal*. Medan : USU.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Sedarmayanti. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profektivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.